

RENCANA AKSI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	RENCANA CAPAIAN				ANGGARAN	AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB
						TW I	TW II	TW III	TW IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	MENINGKATNYA KEPATUHAN DAN KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %					7,224,264,676		SEKRETARIAT
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun	100 %					63,723,155		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		1	1		16,016,755	1. Penyusunan Pohon Kinerja 2. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) 3. Penyusunan Cascading 4. Penyusunan Rencana Aksi (Renaksi) 5. Entri Matriks Renja 2026 pada SIPD RI 6. Menyusun Dokumen Rancangan Renja 2026 7. Entri Renja 2026 pada Si-AsVri 8. Entri Matriks Rancangan Renstra PD 2025-2029 pada SIPD RI 9. Menyusun Dokumen Rancangan Renstra PD 2025-2029 10. Input Renstra dalam Si-Asvri	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen			1		15,717,400	1. Seluruh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Untuk Melakukan Persiapan Entri RKA 2. Operator Melakukan Entri RKA Berdasarkan Sub Kegiatan yang Telah di Akomodir pada Renja 3. Cetak Dokumen Draft RKA dari SIPD RI 4. Verifikasi RKA 5. Perbaikan RKA sesuai dengan Hasil Asistensi	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen			1		15,399,600	1. Seluruh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Untuk Melakukan Persiapan Entri Perubahan RKA-SKPD 2. Operator Melakukan Entri Perubahan RKA-SKPD berdasarkan Sub Kegiatan yang Telah di Akomodir pada Renja 3. Cetak Dokumen Draf Perubahan RKA-SKPD dari SIPD RI 4. Verifikasi Perubahan RKA-SKPD 5. Perbaikan Perubahan RKA-SKPD sesuai dengan Hasil Asistensi 6. Cetak Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koorsinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1				1,075,600	1. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Melakukan Jadwal atas Pelaksanaan Sub Kegiatan 2. Anggaran Kas telah disusun sesuai Pelaksanaan Sub Kegiatan yang Telah ditetapkan 3. DPA yang telah di verifikasi oleh Pengguna Anggaran untuk diverifikasi oleh Sekretaris Daerah 4. Tahap Validasi dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) 5. Cetak Dokumen DPA-SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koorsinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen				1	1,326,400	1. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Melakukan Jadwal atas Pelaksanaan Sub Kegiatan 2. Anggaran Kas telah disusun sesuai Pelaksanaan Sub kegiatan yang Telah ditetapkan 3. Perubahan DPA yang telah di verifikasi oleh Pengguna Anggaran untuk diverifikasi oleh Sekretaris Daerah 4. Tahap Validasi dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) 5. Cetak Dokumen Perubahan DPA-SKPD	

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Laporan	2					1,625,200	1. Menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 2. Menyusun Laporan Kinerja (LAKIP)	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Laporan						12,562,200	1. Melakukan Entri Data Realisasi Fisik dan Keuangan pada Aplikasi Sakti 2. Melakukan Entri Data Realisasi Fisik dan Keuangan pada Microsoft Excel 3. Melakukan Pengentrian Data Realisasi Fisik dan Keuangan pada Aplikasi e-SAKIP Pemerintah Kota Singkawang 4. Melakukan Penginputan Data Evaluasi Renja Berdasarkan SPJ fungsional pada Microsoft Excel 5. Menyusun Data Laporan Monev Renaksi	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Keuangan yang disusun	100	%						4,945,127,395.33		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35	Orang/ Bulan	35	35	35	35		4,464,705,495.33	1. Mengoreksi Gaji Pokok ASN 2. Mengoreksi Tunjangan Keluarga ASN 3. Mengoreksi Tunjangan Jabatan ASN 4. Mengoreksi Tunjangan Fungsional ASN 5. Mengoreksi Tunjangan Beras ASN 6. Mengoreksi Tunjangan PPh/Khusus ASN 7. Mengoreksi Pembulatan Gaji ASN 8. Mengoreksi Iuran Jaminan Kesehatan ASN 9. Mengoreksi Iuran Kecelakaan Kerja ASN 10. Mengoreksi Iuran Jaminan Kematian ASN 11. Mengoreksi Tambahan Penghasilan ASN 12. Mengoreksi TPG ASN 13. Mengoreksi Tamsil ASN	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	3	3	3	3		437,475,000	1. Membuat surat pertanggungjawaban honorarium pegawai 2. Membuat surat pertanggungjawaban lembur 3. Mengajukan proses pencairan kepada bendahara	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	3	3	3	3		28,133,000	1. Verifikasi Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan SKPD 2. Menyerahkan Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan SKPD yang telah diverifikasi 3. Menerbitkan lembar Penelitian PPK SKPD 4. Menerbitkan dokuman SPP LS/GU/TU 5. Menerbitkan dokuman SPM LS/GU/TU 6. Menyerahkan Dokumen Penatausahaan Keuangan SKPD kepada PPKD melalui Bid Perbendaharaan BPKAD	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1					12,527,500	1. Pengumpulan dan verifikasi data realisasi pendapatan, belanja dan aset perangkat daerah 2. Pengolahan data hasil verifikasi realisasi penapatan, belanja dan aset perangkat daerah 3. Pelaksanaan proses entri data transaksi keuangan dan non keuangan harian dan bulanan dalam sistem aplikasi 4. Identifikasi data transaksi keuangan dan non keuangan harian dan bulanan dalam sistem aplikasi 5. Pelaksanaan posting jurnal transaksi keuangan dan non keuangan harian dan bulanan pada aplikasi	

Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2	Dokumen	2					1,405,600	1. Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Pemeriksaan 2. Merumuskan Bahan Tindak Lanjut Pemeriksaan 3. Menyiapkan Bahan Tindak Lanjut Pemeriksaan 4. Memverifikasi Bahan Tindak Lanjut Pemeriksaan 5. Menyerahkan Bahan tindak lanjut Pemeriksaan Kepada APIP	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran	2	Laporan			2			880,800	1. Pengumpulan dan verifikasi data realisasi pendapatan, belanja dan aset perangkat daerah 2. Pengolahan data hasil verifikasi realisasi penapatan, belanja dan aset perangkat daerah 3. Pelaksanaan proses entri data transaksi keuangan dan non keuangan harian dan bulanan dalam sistem aplikasi 4. Identifikasi data transaksi keuangan dan non keuangan harian dan bulanan dalam sistem aplikasi 5. Pelaksanaan posting jurnal transaksi keuangan dan non keuangan harian dan bulanan pada aplikasi	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Aset yang dilaksanakan	100	%						9,036,100		
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	Dokumen			2			6,711,400	1. Membuat Daftar RKBMD 2. Membuat Rekonsiliasi	
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Braang Milik Dearah SKPD	1	Laporan	1					1,466,100	1. Dari Tim KPKNL akan turun langsung mengecek kelengkapan barang-barang yang akan siap di lelang	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Laporan	3	3	3	3		858,600	1. Membuat Rekon bulanan dengan bidang Aset 2. Membuat Rekon bulanan dengan bidang Akuntansi	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian yang dilaksanakan	100	%						18,523,800		
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen	1					1,146,100	1. Menyusun Dokumen Kepegawaian 2. Koordinasi Tim PAK 3. Menyusun Dokumen PAK	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Dokumen	1					17,377,700	1. Menyusun Jadwal Diklat Berdasarkan Jadwal BPK 2. Mengirimkan Peserta Diklat	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Adminitrasi Umum yang dilaksanakan	100	%						492,524,900		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12	Paket	3	3	3	3		9,283,000	1. Pembelian Alat Listrik dan Elektronika 2. Menyusun SPJ	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12	Paket	3	3	3	3		16,636,700	1. Pembelian ATK dan Distribusi 2. Menyusun SPJ	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	12	Paket	3	3	3	3		20,798,200	1. Pembelian Peralatan Rumah Tangga 2. Menyusun SPJ	

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1	Paket			1		6,951,800	1. Pembelian Bahan Logistik Kantor 2. Menyusun SPJ	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1	Paket	1				22,476,200	1. Pengadaan Cetakan 2. Melaksanakan Penggandaan	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1	Dokumen				1	2,039,000	1. Mengumpulkan Data 2. Pembelian Bahan Bacaan dan Distribusi 3. Menyusun SPJ	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan				1	14,340,000	1. Mengumpulkan Data 2. Melaksanakan Jamuan Tamu 3. Menyusun SPJ	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	3	3	3	3	400,000,000	1. Mengumpulkan Data Perjalanan Dinas Luar Daerah 2. Melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3. Menyusun SPJ	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan	100	%					562,573,900		
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan	2	Unit	2				420,000,000	1. Pejabat Pengadaan segera menyusun dokumen pengadaan	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	22	Unit	22				142,573,900	1. Pejabat Pengadaan segera menyusun dokumen pengadaan	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	100	%					652,084,626		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan				1	5,000,000	1. Melakukan Pengiriman Surat 2. Menyusun SPJ	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1	Laporan				1	314,698,800	1. Mengumpulkan Data Jasa Komunikasi, Air dan Listrik 2. Pembayaran Jasa Komunikasi, Air dan Listrik 3. Menyusun SPJ Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1	Laporan				1	332,385,826	1. Melakukan Pembelian Bahan dan Alat Kebersihan 2. Menyusun SPJ	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	100	%					480,670,800		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dn dibayarkan Pajaknya	1	Unit				1	25,250,000	1. Membuat NPD melalui aplikasi 2. Kelengkapan SPJ	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40	Unit	10	20	10		33,834,800	1. Menerima Laporan	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	5	Unit	5				11,586,000	1. Membuat NPD melalui aplikasi 2. Kelengkapan SPJ	

			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	1				410,000,000	1. Membuat NPD melalui aplikasi 2. Kelengkapan SPJ	
2	MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1. Persentase OPD yang Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Tepat Waktu; 2. Persentase Pencapaian Penyerapan Belanja Perangkat Daerah sesuai Target; 3. Persentase OPD yang telah Menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu.	100	%					5,050,614,900		1. BIDANG ANGGARAN DAERAH 2. BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH 3. BIDANG PERBENDAHARAAN DAERAH
			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Penyusunan Rencana Anggaran SKPD Tepat Waktu	100	%					1,204,940,600		BIDANG ANGGARAN DAERAH
			Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	1	Dokumen				1	36,509,500	1. Membuat Surat Edaran Penyusunan KUA dan PPAS Tahun Anggaran N+1 2. Surat Edaran (SE) Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Disampaikan Kepada Seluruh SKPD. 3. Membuka Jadwal KUA dan PPAS pada SIPD RI sesuai dengan Surat Edaran. 4. SKPD melaksanakan entri KUA dan PPAS sesuai jadwal yang telah ditentukan untuk TAPD untuk segera diselesaikan dengan tepat waktu 5. Laporan Rancangan Penyusunan KUA dan PPAS 6. Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS dari TAPD kepada Kepala Daerah 7. Membuat Surat Pembahasan Bersama TAPD dan DPRD mengenai Rancangan KUA dan PPAS 8. Pembahasan Bersama TAPD dan DPRD Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran N+1 9. Kesepakatan Bersama TAPD dan DPRD Dokumen KUA dan PPAS	
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	1	Dokumen				1	21,459,200	1. Membuat Surat Edaran Penyusunan KUA dan PPAS Tahun Anggaran N 2. Surat Edaran (SE) Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Disampaikan Kepada Seluruh SKPD 3. Membuka Jadwal Perubahan KUA dan Perubahan PPAS pada SIPD RI sesuai dengan Surat Edaran 4. SKPD melaksanakan entri KUA dan PPAS sesuai jadwal yang telah ditentukan untuk TAPD untuk segera diselesaikan dengan tepat waktu 5. Laporan Rancangan Penyusunan KUA dan PPAS 6. Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS dari TAPD kepada Kepala Daerah 7. Membuat Surat Pembahasan Bersama TAPD dan DPRD mengenai Rancangan KUA dan PPAS 8. Pembahasan Bersama TAPD dan DPRD Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran N 9. Kesepakatan Bersama TAPD dan DPRD Dokumen KUA dan PPAS	

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang diverifikasi	1 Dokumen			1		38,587,300	1. Membuat Surat Kepada Seluruh SKPD untuk memverifikasi RKA - SKPD 2. Surat Undangan Verifikasi RKA-SKPD diterima oleh seluruh SKPD 3. Tim Verifikasi RKA melakukan verifikasi RKA - SKPD seluruh SKPD sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja yang tertuang dalam SK Tim Verifikasi RKA - SKPD 4. Seluruh SKPD melakukan perbaikan atas verifikasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi RKA - SKPD	
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang diverifikasi	1 Dokumen			1		44,681,000	1. Membuat Surat Kepada Seluruh SKPD untuk memverifikasi Perubahan RKA - SKPD 2. Surat Undangan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD diterima oleh seluruh SKPD 3. Tim Verifikasi RKA melakukan verifikasi Perubahan RKA - SKPD seluruh SKPD sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja yang tertuang dalam SK Tim Verifikasi RKA - SKPD 4. Seluruh SKPD melakukan perbaikan atas verifikasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi Perubahan RKA - SKPD	
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang diverifikasi	1 Dokumen	1				8,195,500	1. Membuat Surat Kepada Seluruh SKPD untuk memverifikasi DPA - SKPD 2. Surat Undangan Verifikasi DPA-SKPD diterima oleh seluruh SKPD 3. Tim Verifikasi DPA-SKPD melakukan verifikasi DPA-SKPD seluruh SKPD sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja yang tertuang dalam SK Tim Verifikasi DPA - SKPD 4. Seluruh SKPD melakukan perbaikan atas verifikasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi DPA - SKPD	
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang diverifikasi	1 Dokumen				1	13,755,700	1. Membuat Surat Kepada Seluruh SKPD untuk memverifikasi Perubahan DPA - SKPD 2. Surat Undangan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD diterima oleh seluruh SKPD 3. Tim Verifikasi DPA-SKPD melakukan verifikasi Perubahan DPA-SKPD seluruh SKPD sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja yang tertuang dalam SK Tim Verifikasi Perubahan DPA - SKPD 4. Seluruh SKPD melakukan perbaikan atas verifikasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi Perubahan DPA - SKPD	

Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1 Dokumen				1	473,008,000	1. Membuat Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD 2. Surat Edaran Pedoman Penyusunan RKA-SKPD disampaikan kepada seluruh SKPD 3. Melakukan entri RKA-SKPD pada Aplikasi SIPD RI sesuai dengan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan APBD 4. Penyampaian Rancangan APBD Kepada Kepala Daerah 5. Pembahasan Penyusunan Rancangan APBD bersama TAPD dan DPRD 6. Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD 7. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kepada Gubernur/Pemerintah Provinsi untuk dievaluasi. 8. Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 9. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi berdasarkan Draf SK Gubernur 10. Penyampaian Keputusan Ketua DPRD tentang Tindak Lanjut Evaluasi Rancangan Perda dan Perkada APBD kepada Gubernur 11. Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kepada Gubernur/Pemerintah Provinsi	
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 Dokumen				1	518,967,300	1. Membuat Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan RKA-SKPD 2. Surat Edaran Pedoman Penyusunan Perubahan RKA-SKPD disampaikan kepada seluruh SKPD 3. Melakukan entri Perubahan RKA-SKPD pada Aplikasi SIPD RI sesuai dengan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Perubahan APBD 4. Penyampaian Rancangan Perubahan APBD Kepada Kepala Daerah 5. Pembahasan Penyusunan Rancangan Perubahan APBD bersama TAPD dan DPRD 6. Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD 7. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kepada Gubernur/Pemerintah Provinsi untuk dievaluasi. 8. Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 9. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi berdasarkan Draf SK Gubernur 10. Penyampaian Keputusan Ketua DPRD tentang Tindak Lanjut Evaluasi Rancangan Perda Perubahan APBD dan Perkada tentang Perubahan APBD kepada Gubernur/Pemerintah Provinsi 11. Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kepada Gubernur/Pemerintah Provinsi	
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen				1	49,777,100	1. Membuat Surat Undangan Seluruh TAPD 2. Surat Undangan disampaikan kepada seluruh TAPD 3. Membuat Daftar Kebijakan Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah 4. Membuat Surat Edaran arah kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Pemerintah Pusat 5. Surat Edaran disampaikan kepada Seluruh Pengguna Anggaran atau Seluruh SKPD agar untuk diketahui lebih lanjut dengan memperhatikan arahan dan instruksi selanjutnya dari Pemerintah Pusat	

Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase OPD yang Menyusun Dokumen Penatausahaan sesuai Anggaran Kas	100 %					254,398,200		BIDANG PERBENDAHARAAN DAERAH
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	3	3	3	3	7,000,000	1. Melakukan koordinasi dengan bidang akuntansi terkait Laporan Perhitungan Keuangan RKUD 2. Membuat Laporan Perhitungan Keuangan RKUD	
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	4 Dokumen	1	1	1	1	33,550,600	1. Membuat Surat Kepada Seluruh SKPD untuk menyusun Angkas 2. Surat Perintah Penyusunan Angkas diterima oleh seluruh SKPD	
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Dokumen	3	3	3	3	130,847,600	1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Transfer	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	3	3	3	3	10,000,000	1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dokumen	3	3	3	3	55,000,000	1. Monitoring Pelaksanaan Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D 2. Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D	
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen				1	18,000,000	1. Menyusun Draf Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah 2. Membahas Draf Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah dengan Perangkat Daerah terkait	

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang disajikan sesuai dengan SAP	100 %					391,028,700		BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	1 Dokumen				1	4,804,800	1. Pengumpulan dan memverifikasi laporan Aset, Kewajiban, Ekuitas 2. Mengumpulkan dan memverifikasi laporan Pendapatan, Belanja, Pembiayaan	
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	7 Laporan	1	2	1	3	256,435,200	1. Monitoring dan konsolidasi penyusunan laporan keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen		1		1	103,275,900	1. Menyusun draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 2. Melaksanakan pembahasan draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen	1				9,029,700	1. Melakukan monitoring atas hasil penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	
Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	12 Dokumen	3	3	3	3	4,144,200	1. Monitoring Pelaksanaan Realisasi pengeluaran belanja SKPD 2. Pelaksanaan Rekonsiliasi Pengeluaran belanja pada tiap SKPD	
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	2 Dokumen			2		13,338,900	1. Menyusun Draf Peraturan Wali Kota tentang Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 2. Membahas Draf Peraturan Wali Kota tentang Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Realisasi Belanja Tidak Terduga	100 %					2,792,917,000		BIDANG PERBENDAHARAAN DAERAH
Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	1				292,917,000	1. Melakukan koordinasi dengan bagian keuangan sekretariat terkait penerbitan dokumen pelaksanaan pembayaran 2. Melakukan pencairan melalui RKUD	
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	1				2,500,000,000	1. Melakukan koordinasi dengan bagian keuangan sekretariat terkait penerbitan dokumen pelaksanaan pembayaran 2. Melakukan pencairan melalui RKUD	

			Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Tercapainya Dukungan Sistem Informasi Keuangan Daerah pada Perangkat Daerah	100 %					407,330,400		BIDANG ANGGARAN DAERAH
			Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen		1			407,330,400	1. Membuat Surat Undangan Bimbingan Teknis Penatausahaan SIPD RI 2. Surat Undangan disampaikan kepada seluruh SKPD untuk mengikuti undangan tersebut 3. Peserta Bimtek Seluruh SKPD 4. Membuat Data Bendahara Penerimaan SKPD 5. Pengajuan Rekening Bendahara Penerimaan SKPD 6. Membuat Data Bendahara Pengeluaran SKPD 7. Pengajuan Rekening Bendahara Pengeluaran SKPD 8. Membuat Data Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Unit Kerja 9. Pengajuan Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Unit Kerja 10. Fungsi Akuntansi SKPKD menjurnal Laporan Keuangan Daerah	
3	OPTIMALISASI PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DAN PEMANFAATAN ASSET	INDEKS PENGELOLAAN ASET	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase OPD yang Menyampaikan RKBMD dan LBMD Tepat Waktu	100 %					808,049,600		BIDANG PENGELOLAAN ASET DAERAH
			Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %					808,049,600		BIDANG PENGELOLAAN ASET DAERAH
			Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang disusun	2 Dokumen	1				143,652,000	1. Membuat Naskah Kesepakatan Kerja Sama antara Pengguna Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura 2. Membuat Surat Permintaan Proposal dari PPK kepada FEB 3. Membuat SK Tim Persiapan dan Tim Pengawasan oleh PPK yang di tanda tangani PA 4. Membuat dokumen reviu proposal (mencakup kesesuaian anggaran, RAB, Tenaga Ahli) 5. Membuat Dokumen Berita Acara Negosiasi 6. Membuat Dokumen Kontrak antara PPK dan Pelaksana 7. Membuat nota dinas/surat dinas 8. Membuat Daftar Hadir Rapat 9. Membuat Notulen Rapat 10. Membuat draf kepwako penyusunan standar harga 11. Entry lampiran Surat Keputusan Walikota kedalam sipd 12. Membuat salinan kepwako penyusunan standar harga	
			Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	1	1			18,609,400	1. Tersusunnya Daftar Hadir Rapat 2. Tersusunnya Notulen Rapat 3. Tersusunnya draf Perwako penyusunan standar barang dan standar kebutuhan 4. Tersusunnya salinan kepwako penyusunan standar barang dan standar kebutuhan	
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2				56,834,200	1. Melakukan rekapitulasi draft RKBMD Perangkat Daerah 2. Melakukan Penelaahan RKBMD dan RKBMD Perubahan Perangkat Daerah 3. Membuat surat undangan pembahasan RKBMD Perangkat Daerah 4. Melakukan Rapat Pembahasan RKBMD dan RKBMD Perubahan Perangkat Daerah 5. Menyusun Penetapan SK Sekretaris Daerah RKBMD dan RKBMD Perubahan	

Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	5	Dokumen	1	2	2		20,850,900	
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2	Laporan		1		1	184,217,000	1. Pengumpulan dan memverifikasi Laporan Rekonsiliasi Aset, berupa Belanja Modal, Kapitalisasi Barang Jasa, Mutasi, Hibah dan Penghapusan Barang Milik Daerah 2. Rekapitulasi Rekonsiliasi Aset berupa Belanja Modal, Kapitalisasi Barang Jasa, Mutasi, Hibah dan Penghapusan Barang Milik Daerah 3. Rekapitulasi Data Reklasifikasi dan Koreksi Aset 4. Rekapitulasi Penyusutan Aset Daerah untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Singkawang 5. Rekonsiliasi antara Bidang Pengelolaan Aset Daerah dengan Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1	Laporan				1	3,995,900	1. Tahap Pendataan 2. Tahap Identifikasi 3. Pelaporan Hasil Inventarisasi 4. Tindak lanjut Inventarisasi
Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1	Laporan			1		252,520,900	1. Membuat Surat Undangan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Percepatan Sertifikasi Aset 2. Membuat Daftar Hadir Rapat 3. Membuat Notulen Rapat 4. Membuat Surat Undangan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Tim Pencegahan Penyalahgunaan Aset 5. Membuat Daftar Hadir Rapat 6. Membuat Notulen Rapat 7. Memverifikasi Data Aset Tanah yang memungkinkan untuk dilakukan penigkatan atau perubahan Hak menjadi Hak Pakai Pemerintah Kota Singkawang 8. Membuat Pengajuan Permohonan Hak 9. Pemasangan Plang dan Master plan pada beberapa Aset yang akan dilakukan pemanfaatan sekaligus Pengamanan Aset
Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1	Laporan		1			58,392,200	1. Terverifikasinya Data/dokumen bahwa barang dipastikan tercatat sebagai Barang Milik daerah 2. Terklasifikasinya Jenis Aset yang akan dilakukan penilaian 3. Tersusunnya Surat Permohonan Penilaian BMD yang akan dilakukan Pemanfaatan maupun Penjualan 4. Pendampingan Penilai turun kelapangan dalam proses penilaian 5. Tersusunnya SK Penjualan/Hibah untuk penilaian dalam rangka penjualan atau pemindahtanganan BMD 6. Tersusunnya Surat Persetujuan Sewa/Pinjam Pakai untuk penilaian dalam rangka pemanfaatan BMD
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	2	Laporan				2	3,113,800	1. Terhimpunnya Dokumen Pakta integritas yang disampaikan Oleh Seluruh OPD 2. Terverifikasinya Dokumen Pakta integritas yang disampaikan Oleh Seluruh OPD 3. Membuat Surat Undangan Pelaksanaan Evaluasi Wasdal BMD 4. Membuat Daftar Hadir Rapat 5. Membuat Notulen Rapat

	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	1	1	1	1	15,772,100	1. Terverifikasinya Aset yang akan dilakukan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan BMD 2. Tersusunnya Telaahan staf terkait BMD yang kan dioptimalkan, baik itu Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD 3. Tersusunnya SK Wali Kota Terakit Pemindahtanganan, Surat Persetujuan Wali Kota terkait Pemusnahan, Penggunaan dan Pemanfaatan Aset 4. Tersusunnya Surat Perjanjian dalam hal Pemannfaatan Aset, BAST dalam ha pemindahtanganan Aset	
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan			1		22,922,400	1. Pengumpulan Dokumen Rapat Koordinasi 2. Melakukan Pengawasan dan Pelaksanaan Rapat Koordinasi	
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan				1	20,333,900	1. Pengumpulan dan memverifikasi Laporan Semester 2. Rekapitulasi Data Laporan Semester	
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	70 Orang				70	6,834,900	1. Pelaksanaan Pembinaan Pengelolaan BMD	
JUMLAH KESELURUHAN								13,082,929,176.33		



 Singkawang, 13 Januari 2025
 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

 Widatoto S. S.E., M.T.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19690403 199710 1 001